

JIKA DEWAN MENGATUR ASAP ROKOK

Ishak Salim¹

4 Mei 2013, di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar berlangsung rapat dengar pendapat. Panitia Khusus penyusun Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok mengundang sejumlah organisasi masyarakat sipil memberikan pendapatnya. Saat itu, hadir pula tiga staf ahli yang membantu anggota Dewan menyusun dan memperbaiki setiap masukan baru yang penting.

Tulisan ini menfokuskan pada kalimat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menjadi fokus ranperda ini. adapun definisi KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Dalam definisi itu, upaya anggota dewan tampaknya bukan lagi sekadar mengatur di mana seorang perokok harus merokok, namun lebih dari itu juga melarang keseluruhan proses produksi, pemasaran, hingga konsumsi merokok. Jelas sekali terdapat pergeseran makna dalam pengaturan soal rokok dan merokok ini. Pergeseran ini tentu berimplikasi pada banyak aspek, khususnya pada aspek ekonomi kota. Awalnya hanya bermaksud mengatur perokok, kini hendak lebih jauh mengatur para pihak yang bergantung pada keseluruhan rantai produksi dan pemasaran rokok di kota Makassar.

Di Makassar, terdapat kurang lebih 60 pasar ‘tradisional’ dan dua areal terminal besar dan beberapa terminal ‘bayangan’. Baik pasar tradisional maupun terminal adalah dua tempat yang masuk dalam kategori publik yang menjadi areal pengaturan ini. Upaya anggota pansus ranperda ini mengundang pegiat pengorganisasian rakyat merupakan langkah yang tepat. Dari mereka kemudian mengalir sejumlah saran-saran untuk memperbaiki kualitas aturan ini.

Bagi penulis, pandangan kesehatan atas ranperda ini sesungguhnya sudah sampai pada tahap yang menjemukan. Dari mulai naskah akademis yang melulu bicara soal kesehatan dengan hasil-hasil penelitian dalam skala global dan merujuk pada hasil-hasil penelitian dari luar negeri. Pun dengan data-data kematian yang dikatakan bersumber dari rokok yang angka-angkanya seolah sekadar ditempelkan tanpa penjelasan bagaimana seorang yang sudah mati kemudian dikatakan sebagai orang yang kematiannya disebabkan oleh konsumsi rokoknya, dan seolah-olah menjadi faktor tunggal.

Hal lain yang juga menjemukan adalah dengan menyebut si perokok seolah-olah pesakitan yang mesti diasingkan, dicap sebagai perusak kesehatan tubuhnya bahkan penyebab kesakitan dan kematian orang-orang di sekitarnya yang kemudian disebut sebagai perokok pasif. Bahkan, seorang anggota DPRD yang juga menjadi anggota pansus menyebutkan bahwa dirinya setiap tahun pasti menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit minimal 10 hari akibat kawan-

1 Peneliti Masalah Ekonomi Politik, Active Society Institute (AcSI)

kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya adalah perokok dan dia menjadi perokok pasif [yang aktif]. Sebuah cara pandang yang lagi-lagi mengaitkan sehat tidaknya seseorang dari sebab tunggal: rokok!

Sebenarnya, kampanye anti rokok ini memang sudah mengglobal dan menasional bahkan mendesa, di mana ada beberapa desa yang sudah turut larut dalam pertarungan wacana ini dan mengatur desanya sebagai daerah bebas rokok. Hanya saja, pertarungan ini selalu diarahkan kepada satu-satunya urusan, yakni soal kesehatan. Sesuatu yang jika coba dipelajari lebih lanjut seharusnya bisa membawa kita pada pengetahuan yang lebih luas, seperti benarkah persoalan ini hanya pada soal sehat-tidaknya seseorang dan bukan sebuah persaingan dagang antara perusahaan satu dengan perusahaan lain? atau apakah yang dimaksud tubuh atau diri yang sehat? atau apakah produk yang kita konsumsi selain rokok juga pada dasarnya sehat? Apakah lingkungan kita hanya dikotori oleh asap rokok? Bagaimana dengan asap pabrik dan kendaraan yang juga melingkupi hidup kita sehari-hari? Bagaimana dengan pola olah raga kita? Apakah teratur atau nyaris tak pernah lagi? Atau apakah kita hidup sudah menyeimbangkan antara berpikir positif, beraktifitas positif, dan beribadah secara positif? Apakah kita punya etika atau tidak sebagai konsumen? Apakah kita benar-benar peduli dan sudah mendidik anak-anak kita soal konsumsi produk yang sehat dan berperilaku hidup sehat? Dan terakhir apakah kita berdaulat sebagai konsumen?

Kedaulatan konsumen berarti sebuah upaya bersusah payah dari setiap konsumen untuk mengetahui kandungan dan khasiat suatu produk, petunjuk konsumsi sebuah produk, hingga mengetahui lebih jauh dampak dari sebuah proses produksi sebuah produk terhadap lingkungan, komunitas adat, hingga orang-orang yang jauh dari lingkungan kita, semisal petani dan buruh.

Dalam konteks aturan ini, salah satu organisasi masyarakat sipil yang turut hadir adalah Komunitas Kretek Makassar. Komunitas ini dengan tegas menolak pengaturan ini dan segala asumsi kesehatan yang menjadi acuan aturan ini. akitifisnya memandang bahwa pemerintah tidak layak mengurus soal etika konsumen (misalnya mengatur dimana seseorang harus merokok) di saat ada institusi pendidikan yang bisa mengajarkan orang bagaimana bersikap dalam sebuah lingkungan sosial. Bagi komunitas kretek ini, persoalan merokok adalah persoalan bisnis dan persaingan antara pengusaha nasional dan pengusaha asing. Melalui berbagai regulasi pengusaha asing memaksa pemerintah memberlakukan standar kualitas tembakau yang sehat, yakni dengan menggunakan tembakau tar rendah yang nota bene adalah tembakau Virginia. Jadi kelak, walaupun tetap bisa mengonsumsi rokok, maka rokok yang diproduksi adalah rokok dengan tembakau asing, sehingga kita mesti mengimpor dan mengabaikan tembakau lokal sendiri yang bibitnya bisa dengan mudah diusahakan petani tanpa harus membeli dari asing. Faktanya kini, satu persatu perusahaan yang dikuasai oleh pengusaha Indonesia semakin berkurang, baik akibat kebangkutan maupun akuisisi perusahaan asing.

Terlepas dari niat baik dari anggota dewan Makassar, upayanya mengatur kawasan tanpa rokok tak lepas efek kepengikutan atas wacana global pengaturan tembakau, namun sayangnya abai

atau menempatkan ke prioritas sekian soal-soal lebih mendasar kota Makassar, seperti soal penambahan jumlah kendaraan yang tak terkendali, reklamasi pantai yang semakin menambah risiko terjadinya bencana, banjir yang semakin meluas akibat drainase yang buruk, ekspansi pasar modern khususnya di level minimarket yang menyusahkan *gadde-gadde* dan pasar lokal, atau maraknya industri *games* rumahan yang membuat anak-anak usia sekolah semakin sering menghabiskan waktu di dunia maya dan semakin menjauhkan diri dari buku dan aktifitas fisik di lingkungannya[].